

ETIKA DAN KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK

Ahmad Rizky Pratama Lubis,¹ Agusman Damanik²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²

ahmadrizkypratamalubis016@gmail.com, agusmandamanik362@gmail.com

Abstrak

Salah satu cara yang diharapkan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara adalah dengan menerapkan etika politik, yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Etika politik adalah kristalisasi logika politik warga negara. Ini adalah dasar dari logika yang berkembang di ranah publik untuk menciptakan kohesi sosial. Dengan etika, orang akan dididik menjadi politikus yang memperhatikan masyarakat dan bertindak berdasarkan akal sehat untuk memastikan bahwa masyarakat yang dipimpinnya aman dan sejahtera. Pelanggaran etika politik dapat mengancam nalar kebangsaan dan mengancam integrasi sosial. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memeriksa literatur dari sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menekankan peran pemerintah, masyarakat, organisasi Islam, ulama, dan pendidikan politik. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, diperiksa, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan solusi dari masalah.

Kata Kunci: Politik, Etika, Integrasi

Abstract

One of the expected ways to achieve the progress of the nation and state is to apply political ethics, which prioritizes common interests over personal and group interests. Political ethics is the crystallization of citizens' political logic. It is the basis of the logic that develops in the public sphere to create social cohesion. With ethics, people will be educated to be politicians who pay attention to society and act based on common sense to ensure that the society they lead is safe and prosperous. Violations of political ethics can threaten national reasoning and threaten social integration. This paper uses a qualitative research method by examining literature from secondary sources such as books and journals. This research emphasizes the roles of the government, society, Islamic organizations, clerics, and political education. The data obtained will be collected, examined, and synthesized and then thoroughly analyzed to find a solution to the problem.

Keywords: Politics, Ethics, Integration

PENDAHULUAN

Salah satu cara yang diharapkan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara adalah dengan menerapkan etika politik, yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, etika mengedepankan hal-hal seperti

kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa. Namun, kita harus mengakui fakta bahwa saat ini banyak kalangan elit politik yang cenderung berpolitik tanpa memperhatikan etika kenegarawanan.

Kenyataannya adalah bahwa mereka berpolitik secara tidak rasional, mengutamakan emosi dan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional. Sesuai dengan tuntutan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan amanat dan menepati janji sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, pemerintahan yang ideal hanya dapat terjadi jika para pemimpinnya memiliki kesadaran yang kuat akan tanggung jawab moral.

Saat ini, etika sangatlah penting, terlebih lagi dalam kehidupan politik. Karena etika membatasi bagaimana kita dapat berperilaku dan bagaimana kita harus berperilaku dengan orang-orang dalam kelompok masyarakat kita. Meskipun penerapan etika bergantung pada tingkat kesadaran setiap orang, tetapi ketika nilai-nilai etika diajarkan dan dijiwai oleh masyarakat, serta menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara, nilai-nilai tersebut mengikat dan menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mematuhi. Tidak ada alasan untuk melanggarnya.

Dengan etika, orang akan dididik menjadi politikus yang memperhatikan masyarakat dan bertindak berdasarkan logika yang sehat untuk memastikan bahwa masyarakat yang dipimpinnya aman dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Politik

Politik adalah arena di mana keputusan kolektif dibuat, kekuasaan diorganisir, dan sumber daya didistribusikan dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan Peter Frankel (1926) menerangkan politik merupakan cara bagaimana mencapai kondisi tatanan sosial yang baik dan berkeadilan,¹ sedangkan Thomas T. Pureklolon (2018) mengatakan politik sebagai sebuah seni dalam kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan.² Konsep politik dengan definisi ini demikian tak lepas dari istilah "kekuasaan" yang dimaknai sebagai posisi seseorang mampu mempengaruhi orang lain. Kekuasaan bagi Bertrand Russell (1872-1970) merupakan hasil pengaruh dari yang diinginkan.³

Russell menjelaskan bahwa dorongan seseorang berkuasa tidak mengenal batas, selalu ada keinginan berkuasa mempengaruhi seseorang

¹ Halim. Abd. "politik lokal : aktor, problem, dan konflik dalam arus demokratis"(malang : intrans publishing. 2018). Hlm 1

² Pureklolon. Thomas T, "politik nasionalisme : narasi nasionalisme dalam membangun kesadaran berpolitik dan bernegara"(malang : intrans publishing. 2018). Hlm 5

³ Russell, Bertrand. "Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Dan Politik" Terj Hasan Basri. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor. 2019). Hlm 29

mencapai hal kepentingan. Setiap orang memiliki dorongan untuk berkuasa, baik seorang penguasa yang di legitimasi hukum/ konstitusi, atau para massa memiliki dorongan berkuasa, tetapi cukup menjadi pengikut dari seorang penguasa atau pendukung.⁴

Politik dianggap telah merosot dari bisnis menjadi kaya raya bersama seluruh keluarga, di sini integritas pribadi politisi justru hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangan demi kepentingan politik, demi untuk memenangkan suatu tujuan, melainkan ia sendiri menjadi kotor. Satu-satunya penyebab itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan.

Di pihak lain orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan di luar batas hukum adalah sesuatu yang lumrah, dicap sebagai bodoh dan naif. Pernyataan tentang kekotoran hakiki “bisnis politik” ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi. Fungsinya adalah melicinkan jalan bagi mereka yang memang bersedia menerima kotor utama demi kepentingan mereka sendiri. Pernyataan yang “selfserving” dan “selffulfilling” itu kedengarannya rendah hati dan realistik. Tetapi sebenarnya adalah rendahnya hati yang palsu dan realisme yang bohong.

Sumber pengajaran etika dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, terdapat banyak nilai-nilai etika yang termaktub di dalamnya, di antaranya adalah kewajiban untuk berlaku adil kepada manusia baik muslim atau non-muslim, menepati janji, tidak merusak perjanjian, musyawarah, dan amanah. Praksis etika politik Islam juga tercermin dalam sukseksi kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan Khulafa' al-Rasyidin.

Penerapan nilai etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dan pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan. Urgensi etika politik juga tercermin dalam organisasi publik karena di dalamnya mengandung implikasi adanya kekuasaan. Setiap pejabat di berbagai jenjang organisasi publik memiliki kekuasaan sesuai dengan ruang lingkup jabatannya masing-masing.

Kasus dan Perspektif Etika

Untuk membahas tentang kejujuran menjadi alasan strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi, akan dilihat melalui beberapa perspektif etika, yaitu etika keutamaan, etika deontologis dan etika teleologis. Dalam etika keutamaan tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Etika

⁴ Russell, Bertrand. “Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Dan Politik” Terj Hasan Basri. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor. 2019). Hlm 29

keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.⁵

Politik sebagai instrument untuk meraih kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan bisa diwujudkan. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan kebajikan tersebut seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik yang tidak mencerminkannya.

Kita melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya sedang pergi meninggalkan bangsa ini. Seharusnya seorang politisi tidak hanya harus bersifat jujur ramah, namun harus penuh tanggung jawab. Seorang politisi tidak hanya pintar bersilat lidah namun mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan omongannya.

Politik moral adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan politik yang sehat. Politik moral bagaikan sebuah panduan dan manual tindakan bagi politisi. Penuh tanggung jawab, populis, adil dan jujur adalah etika dalam politik yang tetap harus dijunjung tinggi. Selain itu dapat diasumsikan bahwa, gagal berperilaku baik secara moral menunjukkan lemah atau kerosnya karakter moral seseorang.⁶ Sekali lagi, memiliki karakter moral artinya selalu berperilaku secara moral.

Tentu selalu ada godaan atau peluang untuk berperilaku tidak bermoral, dan itulah realitas kemanusiaan kita. ⁷Yang membedakan seseorang memiliki karakter moral atau tidak adalah apakah dia konsisten dan memiliki komitmen berperilaku secara moral atau tidak.⁸ Ketika seseorang berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab.⁹

Orang jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya sendiri, membenci segala macam rasionalisasi serta menghindari pembawaan berlebihan. Akhirnya, orang jujur tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran adalah prasyarat semua keutamaan moral lainnya. Semua sikap moral yang pada dirinya sendiri kita puji akan kehilangan

⁵ Dr. Drs. Islamil, M.Si. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Edited by M.H M. Nasrudin. 1st ed. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, n.d.

⁶ Haeli, and Widyaiswara. "Diklat Dasar CPNS Golongan III Kementerian Hukum Dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah NTB Pola Kemitraan Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018," 2018. https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/ETIKA-PUBLIK_HAELI-Latsar.pdf.

⁷ Romo Antonius Benny Susetyo. "Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia." Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2021. <https://bpip.go.id/artikel/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia>.

⁸ Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Lembaga Hidup*. Edited by Muh. Iqbal Santosa. 1st ed. Republika Penerbit, 2015.

⁹ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. 2nd ed. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

nilai mereka bila orang yang memperlihatkannya tidak jujur. Tapi bagaimana kita menanggapi argumen bahwa untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, kesetiaan, kejujuran dan fairness harus dikesampingkan?

Memang benar bahwa bidang politik bukan untuk orang yang polos atau suci. Kelicikan, untuk bersikap pragmatis, untuk tidak dihalang-halangi oleh perasaan sungkan dan pertimbangan sekadar kekeluargaan itu semua prasyarat seorang politisi yang mau sukses. Menurut etika egoisme, suatu perbuatan dinilai baik apabila memberikan manfaat, kebahagiaan atau kepentingan bagi dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain. Aliran ini mengalami perkembangan menjadi egoisme etis dan egoisme psikologis.¹⁰

Dalam egoisme etis, tindakan apapun termasuk mengorbankan diri untuk orang lain adalah untuk kepentingan pemuasan diri sendiri. Sedangkan egoisme psikologis berdasarkan pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya. Kasus politisi yang tidak jujur jika dilihat dari perspektif etika teleologi dapat diasumsikan bahwa kebohongan yang dilakukan oleh politisi tersebut dengan maksud untuk mencapai kepentingan atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan kejujuran.

Upaya Penanaman Etika Kejujuran dalam Politik

Pancasila, norma agama, dan norma budaya adalah sumber etika pemerintahan Indonesia yang umum diketahui. Ketiga sumber ini berfungsi sebagai pijakan dalam kehidupan bangsa dan negara untuk mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan prinsip moral. Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah negara dan berfungsi sebagai sumber moralitas, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dalam konteks politik Islam, dua sumber hukum utama Islam, al-Qur'an dan al-Hadits, berfungsi sebagai sumber pengajaran moral.

Dalam berpolitik, kejujuran sangat memerlukan keberanian. Suatu keberanian yang dilandasi kesadaran, proses berpolitik yang tak sehat tak hanya merusak proses demokrasi yang tengah dibangun. Tetapi, juga merusak tatanan dan system politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi bersama. Artinya, secara kasat mata publik melihat, politik saat ini masih didominasi permainan-permainan tidak sehat yang melahirkan para politisi bermental tidak sehat. Sehingga, orientasi politiknya pun tidak sehat, sebatas memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya meski harus menempuh cara-cara yang tidak sehat.

¹⁰ Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dan Aplikasinya Di Indonesia." Al-Ulum, 2013, 435-52.

Kejujuran dalam berpolitik sangat penting sekali dalam upaya memperbaiki keadaan bangsa ini yang penuh dengan kepalsuan. Mulai dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, katanya, kejujuran ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Politisi yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politisi yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaankeutamaan moral. Dasar pemikiran inilah penulis jadikan landasan untuk menyusun jurnal, bagaimana kejujuran menjadi alasan strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi.

KESIMPULAN

Dalam politik, etika mengacu pada prinsip moral yang harus dipegang oleh para politisi saat mereka menjalankan tanggung jawab dan kewenangan mereka. Ini mencakup pengambilan keputusan yang adil, jelas, dan bertanggung jawab serta berfokus pada kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, prinsip etika politik menuntut para pemimpin untuk menghormati hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku politisi sekarang ini merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan *take and give*, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya politisi yang tidak jujur. Sepertinya di Indonesia, mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur, berintegritas dan santun, yang melakukan praksis politik dalam koridor moral dan etika sudah sangat sulit dan langka. Namun bahwa di antara sekian banyak elit politik, tentu masih ada yang menjadikan kejujuran sebagai basis etikanya.

Etika dalam politik juga mencakup integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Para politisi diharapkan untuk menjaga akuntabilitas dan tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, etika politik juga menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dengan menjaga dialog yang konstruktif dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini penting agar sistem politik dapat berjalan secara demokratis, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat.

Referensi

- Islamil. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Edited by M.H. M. Nasrudin. 1st ed. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Lembaga Hidup*. Edited by Muh. Iqbal Santosa. 1st ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Halim, Abd. *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratis*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Pureklolon, Thomas T. *Politik Nasionalisme: Narasi Nasionalisme dalam Membangun Kesadaran Berpolitik dan Bernegara*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Russell, Bertrand. *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial dan Politik*. Translated by Hasan Basri. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- Soerjono Soekanto, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. 2nd ed. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Haeli, and Widyaiswara. "Diklat Dasar CPNS Golongan III Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah NTB Pola Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018." 2018. <https://bpsdmd.ntbprov.go.id>.
- Romo Antonius Benny Susetyo. "Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia." Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2021. <https://bPIP.go.id>.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dan Aplikasinya di Indonesia." *Al-Ulum*, 2013, 435–52.